

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

NAMA : AUDI NUR KHALIS

NPM : 1905170059

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cordat | Terpercaya

MABULIS HIMPUNAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : AUDI NUR KHALIS
NPM : 1905170059
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN.

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Penguji II

(M. FIRZA ALFI, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(ISNA ARDILA, S.E, M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUYAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : AUDI NUR KHALIS
N P M : 1905170059
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 12 September 2023

Pembimbing Skripsi

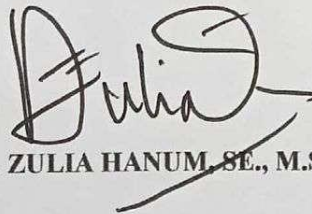


(Isna Ardilla, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU





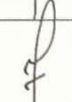

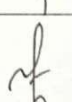

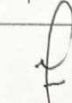
(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



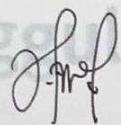
(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AUDI NUR KHALIS
N P M : 1905170059
Dosen Pembimbing : ISNA ARDILLA, SE., M.Si
Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- latar belakang dipertent. dg teori pendukung Permasalahan : Standard Kono V fm - Rumusan masalah	17 Juni	
Bab 2	- Landasan teori, terkait VFM - Kerangka Berfikir	28 Juni	
Bab 3	- Definisi operasional - teknik analisis data	11 Juli	
Bab 4	- Kesimpulan - Saran	24 Agustus	
Bab 5	- Pembahasan menjawab Rumusan Masalah - Teori pendukung pembaharuan - Anal Perhitungan terdahulu	29 Agustus	
Daftar Pustaka	Aplikasi: Mendeley - WIP & ATR: DORA	6 Sept	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ada untuk di adingkan selesai Bimbingan Skripsi.	12 Sept 2023	

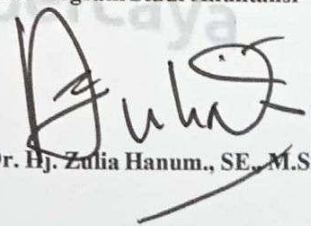
Dosen Pembimbing


(Isna Ardilla, SE., M.Si)

Medan, 12 September 2023

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi


(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum., SE., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawab ini:

Nama : AUDI NUR KHALIS
NPM : 1905170059
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



Audi Nur Khalis

ABSTRAK

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN

AUDI NUR KHALIS

Program Studi Akuntansi

E-mail: audinurkhalis@gmail.com

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui *value for money* pada laporan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan *value for money* dengan rasio ekonomis pada BAPPEDA Kota Medan berada dalam kategori kurang ekonomis. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan *value for money* dengan rasio efisiensi pada BAPPEDA Kota Medan berada dalam kategori tidak efisien. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan *value for money* dengan rasio efektifitas pada BAPPEDA Kota Medan berada dalam kategori cukup efektif. Penyebabnya tidak tercapainya realisasi belanja pada BAPPEDA Kota Medan antara lain dikarenakan lemahnya perencanaan anggaran, proses tender yang lambat, transfer keuangan daerah dari pusat yang terlambat dan analisa standar biaya yang belum tepat

Kata Kunci : *Value for money*, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

ABSTRACT

VALUE FOR MONEY ANALYSIS IN ACCOUNTABILITY REPORTS PERFORMANCE OF GOVERNMENT AGENCIES (LAKIP) AGENCY DEVELOPMENT PLANNING MEDAN CITY REGION

AUDI NUR KHALIS

Accounting Study Program

E-mail: audinurkhalis@gmail.com

This research is a research conducted to find out the value for money in government agency Performance Accountability Reports (LAKIP) Regional Development Planning Agency Medan city. This study uses a descriptive approach with primary data sources obtained directly from the company. The analysis carried out in this study used descriptive analysis techniques.

Based on the research results, it can be concluded that government agency accountability reports (LAKIP) as measured using value for money with economic ratios at BAPPEDA Medan City are in the less economical category. Government agency accountability reports (LAKIP) as measured using value for money with efficiency ratios at BAPPEDA Medan City are in the inefficient category. Government agency accountability reports (LAKIP) as measured using value for money with an effectiveness ratio at the Medan City BAPPEDA are in the fairly effective category. The reason for not achieving the realization of spending at BAPPEDA Medan City is due to, among other things, weak budget planning, a slow tender process, late transfers of regional finance from the center and an analysis of standard costs that are not yet correct.

Keywords: Value for money, Accountability, Reports of Government Agencies

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan terutama kedua orang tua saya yang teristimewa Papa Hendri Antoni, Mama tercinta saya Tri Astuti dan Adik tersayang Khalis Sandi serta dari berbagai pihak peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Isna Ardila, SE., M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbing dan arahan yang banyak dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Biro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Pimpinan beserta seluruh pihak BAPPEDA Kota Medan yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti.
10. Teman-teman seperjuangan saya Suci, Faisal, Tina, Wan , Nisa, Farhan, Vira, dan Firma yang mendukung dan menemani saya sampai dengan hari ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya khususnya bagi peneliti sendiri. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2023
Peneliti

AUDI NUR KHALIS
NPM. 1905170059

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1. Uraian Teoritis	11
2.1.1. <i>Value For Money</i>	11
2.1.1.1. Pengertian <i>Value For Money</i>	11
2.1.1.2. Manfaat <i>Value For Money</i>	12
2.1.1.3. Indikator <i>Value For Money</i>	13
2.1.1.4. Pengukuran <i>Value For Money</i>	14
2.1.2. Kinerja Instansi Pemerintahan	17
2.1.2.1. Pengertian Kinerja Instansi Pemerintahan	17
2.1.2.2. Tujuan dan manfaat Kinerja Instansi Pemerintahan ...	19
2.1.2.3. Faktor yang mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintahan.....	23
2.1.2.3. Indikator Kinerja Instansi Pemerintahan.....	24
2.2. Penelitian terdahulu.....	26
2.3. Kerangka Berfikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Pendekatan Penelitian	31
3.2. Definisi Operasional	31

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.4. Jenis Data	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data	34
3.6. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Hasil Penelitian	36
4.2. Pembahasan.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi APBD	6
Tabel 1.2 Pengukuran <i>Value For Money</i> pada BAPPEDA Kota Medan.....	7
Tabel 2.1 Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan.....	15
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	16
Tabel 2.3 Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan	17
Tabel 2.4 Penelitian terdahulu.....	26
Tabel 3.1 Jadwal Rencana Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Rasio Ekonomis	39
Tabel 4.2 Rasio Efisiensi.....	42
Tabel 4.3 Rasio Efektifitas	44
Tabel 4.4 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah BAPPEDA Kota Medan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	30
-----------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya organisasi sektor publik sering diartikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk kepentingan publik. Atas dasar bertujuan untuk kepentingan publik maka organisasi sektor publik biasanya tidak berfokus pada laba atau keuntungan sebagai tujuan akhirnya. Akan tetapi organisasi sektor publik memiliki fokus untuk kesejahteraan masyarakat. Namun suatu organisasi tetap menjalankan proses manajemen seperti kegiatan perencanaan, pengendalian biaya, dan kegiatan serta evaluasi. Organisasi sektor publik biasanya merujuk pada organisasi pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Organisasi sektor publik berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, dimana pemerintah diberi kekuasaan oleh masyarakat untuk mengatur dan menjamin pemenuhan segala kebutuhan barang dan jasa publik berdasarkan hukum yang berlaku (Biduri, 2018).

Menurut (Halim & Kusufi, 2014) Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan (Putry & Badrudin, 2017) menyatakan Pendapatan Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segala penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah yaitu terdiri dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selanjutnya menurut (Halim & Kusufi, 2014) mengatakan bahwa Belanja daerah merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 53 “Belanja daerah adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”. Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja daerah merupakan seluruh anggaran pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat untuk umum dan manfaatnya lebih dari satu tahun yang berbentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Dengan demikian Pendapatan dan Belanja sangat berkaitan erat dalam pembangunan di suatu daerah, dimana dalam rangka pembangunan daerah diperlukan sumber dana yang bersumber dari pendapatan daerah dan pengeluaran untuk pembangunan tersebut adalah belanja daerah, sehingga hal ini sangat bermanfaat bagi umum bukan hanya dinikmati oleh sebagian pihak atau pribadi.

Jangka waktu manfaatnya lama dan perlu perawatan dan evaluasi hasil agar lebih lebih baru dan bermanfaat bagi umum.

Pengukuran kinerja dalam instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu instansi pemerintah (Hanum et al., 2021). Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolak ukur yang telah dibuat terhadap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban aparat pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Instansi Pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis yang sesuai dengan konsep berbasis kinerja, yang dapat dilakukan dengan konsep *value for money*, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. (Biduri, 2011)

Value for money merupakan suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program yang mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dikatakan ekonomis apabila rasio yang di capai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik. Kemampuan daerah dalam menjalani tugasnya di katagorikan efektif apabila rasio yang di capai melebihi seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kinerja pemerintah

daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisien apabila rasio yang di capai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Melalui konsep *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran dana yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat. Organisasi sektor publik sering dinilai sebagai tempat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. Sehingga muncul tuntutan baru agar organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan metode *value for money*, selain penilaian kinerja yang bersifat finansial terdapat juga penilaian kinerja yang bersifat non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten seperti memenuhi ekspektasi pelanggan sasaran.(Ardila & Putri, 2015).

Value for money bermanfaat dalam pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik karena sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai dasar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selain itu, *value for money* dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai dengan target sehingga terciptanya kualitas pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif. (Rahman, 2022)

Tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis (hemat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (meminimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan hasil), serta efektivitas (berhasil mencapai tujuan dan sasaran). Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat

kualitas tertentu pada harga terbaik. Dan efisiensi artinya hasil tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya dan Efektivitas artinya kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.(Rahman, 2022).

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan yang terletak di Kantor Walikota Medan memiliki tugas membantu Walikota Medan untuk menentukan arah dan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan kota. Bappeda Kota Medan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Medan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bappeda Kota Medan mempunyai fungsi (sumber Bappeda) : 1. Merumuskan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan kota. 2. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan kota jangka panjang dan kota jangka menengah (lima tahun) 3. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 4. Mengikuti perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan kota untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut. 5. Melaksanakan perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut. 6. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya. 7. Melakukan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berikut ini diuraikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BAPPEDA Kota Medan ;

Tabel 1.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAPPEDA Kota Medan (dalam ribuan)

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2018	4,657,852,400	3,680,590,700	18,161,993,786	12,240,828,664
2019	4,727,852,448	3,901,684,751	20,001,322,735	13,689,194,382
2020	4,857,552,448	4,121,585,751	19,476,527,595	12,876,730,142
2021	5,208,964,175	5,021,257,837	24,292,278,919	16,386,575,629
2022	6,522,123,770	5,657,816,889	27,213,216,618	25,005,731,674

Sumber : BAPPEDA Kota Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya dari realisasi pendapatan tahun 2018-2022 tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan, kemudian juga dengan belanja daerah lebih besar dari pendapatannya. Pada tahun 2020 anggaran pendapatan yang ditetapkan tidak sesuai dan lebih rendah dengan realisasi yang terjadi, begitu juga pada tahun 2021 anggaran pendapatan yang ditetapkan tidak sesuai lebih rendah dengan realisasi pendapatannya yang terjadi. Menurut (Purnamasari et al., 2014) realisasi pendapatan yang baik adalah ketika realisasi anggaran tersebut lebih besar daripada anggaran pendapatan yang ditetapkan, demikian juga dengan realisasi belanja yang baik adalah ketika realisasi belanja sesuai dan tidak dibawah dengan anggaran belanja yang ditetapkan.

Ketika realisasi pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan dan direncanakan di awal, artinya pembangunan daerah akan menjadi mudah karena memiliki sumber dana sesuai dengan yang diharapkan, begitu juga dengan anggaran belanja daerah, ketika sesuai dengan yang dianggarkan maka artinya pengeluaran yang direncanakan untuk pembangunan akan sesuai dengan jumlah biaya yang ditetapkan (Purnamasari et al., 2014). Sebagai contoh ketika pembangunan sebuah stadion sepakbola sudah ditetapkan belanja daerah yang akan dikeluarkan sebesar 1 Trilyun, maka ketika belanja daerah yang terealisasi

hanya sebesar 900 milyar artinya akan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan biaya-biaya yang dianggarkan atau bisa jadi kualitasnya jadi menurun.

Tabel 1.2. Pengukuran Value For Money pada BAPPEDA Kota Medan

Rasio	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomis	67,4%	68,4%	66,1%	67,5%	91,9%
Efisiensi	30,1%	28,5%	32,0%	30,6%	22,6%
Efektifitas	79,0%	82,5%	84,8%	96,4%	86,7%

Sumber : Data BAPPEDA (diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasannya pengukuran *value form money* berdasarkan rasio ekonomis pada tahun 2018 sebesar 67,7%, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 68,4%, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 66,1%, kemudian meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 67,5% dan tahun 2022 sebesar 91,9%, rata-rata rasio ekonomis memiliki nilai 72,6% dan berada dalam kategori kurang ekonomis karena berada diantara 60%-70% (Purnamasari et al., 2014), kemudian rasio efisiensi pada tahun 2018 sebesar 30,1% menurun di tahun 2019 menjadi sebesar 28,5%, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 32,0%, dan menurun kembali di tahun 2021 dan 2022 menjadi 30,6% dan 22,6%, rata-rata rasio efisiensi memiliki nilai 28,76% dan berada dalam kategori tidak efisien karena berada diantara <60% (Purnamasari et al., 2014), sedangkan rasio efektifitas pada tahun 2018 sebesar 79,0%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 82,5%, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 84,8%, pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 96,4% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 86,7%, rata-rata rasio efektifitas memiliki nilai 85,88% dan berada dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 60%-70% (Purnamasari et al., 2014).

Dalam menilai kinerja anggaran juga dapat dilakukan dengan analisis dari selisih pendapatan dan belanja, (Setiawati, 2020) menjelaskan bahwa analisis varians dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih terjadi antara anggaran dengan realisasi. Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu selisih menguntungkan (*favourable*) dan tidak menguntungkan (*unfavourable*). Varians antara anggaran dengan realisasinya bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya. *Favourable variance* adalah ketika realisasi belanja lebih kecil dari anggaran, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance*. Dari tabel di atas dapat dilihat dari beberapa tahun LRA BAPPEDA di atas terlihat selisih anggaran yang tidak menguntungkan (*unfavourable*) dari tahun ke tahun baik dari segi pendapatan maupun belanja.

Sehubungan dengan fenomena yang dialami perusahaan maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang berjudul “**Analisis Value for money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada BAPPEDA Kota Medan**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data diatas maka dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Realisasi belanja masih lebih besar dari realisasi pendapatan
2. Pengukuran *value for money* untuk rasio ekonomis pada BAPPEDA Kota Medan berada dibawah standart
3. Pengukuran *value for money* untuk rasio efisiensi pada BAPPEDA Kota Medan berada dibawah standart

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan *value for money* pada BAPPEDA Kota Medan?
2. Apa faktor-faktor penyebab rasio-rasio *value for money* tidak sesuai dengan standart pada BAPPEDA Kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan *value for money* pada BAPPEDA Kota Medan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab rasio-rasio *value for money* berada dibawah standart pada BAPPEDA Kota Medan

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah:

- a. Pengembangan ilmu akuntansi, diharapkan dapat di kembangkan lagi pada penelitiaan-penelitian berikutnya daik dalam unit yang sama maupun dalam unit yang berbeda.
- b. Bagi peneliti, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai konsep *value for money*, khususnya kinerja instansi

pemerintahan.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam konsep *value for money* dan dapat mengembangkan dalam hal kinerja instansi pemerintahan ataupun faktor lain yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi manajemen, sebagai bahan masukan dalam mengefektifkan sistem pengendalian internal penjualan.
- b. Bagi instansi lain sebagai bahan evaluasi terhadap konsep *value for money* pada LAKIP BAPPEDA Kota Medan

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1 *Value for Money*

2.1.1.1. Pengertian *Value for Money*

Value for money adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat ditinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik (Ardila & Putri, 2015). *Value for money* merupakan suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program yang mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Melalui konsep *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran dana yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat. Organisasi sektor publik sering dinilai sebagai tempat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. Sehingga muncul tuntutan baru agar organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan metode *value for money*, selain penilaian kinerja yang bersifat finansial terdapat juga penilaian kinerja yang bersifat non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten seperti memenuhi ekspektasi pelanggan sasaran.

Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis agar fungsi perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik. *Value for money* menuntut organisasi sektor publik agar bisa memenuhi prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas secara bersama-sama.

2.1.1.2. Manfaat *Value for Money*

Value for money bermanfaat dalam pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik karena sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai dasar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selain itu, *value for money* dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai dengan target sehingga terciptanya kualitas pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Manfaat penerapan *value for money* bagi sektor publik dan masyarakat adalah sebagai berikut (Rahman, 2022) :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.1.1.3. Indikator *Value for Money*

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Rahman, 2022). Adapun tiga elemen utama dalam *value for money*, yaitu sebagai berikut:

1) Ekonomis

yaitu perolehan sumber daya dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan antara sumber daya dengan biaya sumber daya yang dinyatakan dalam satuan moneter. Hal ini berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir penggunaan sumber daya yaitu dengan menghindari pengeluaran yang tidak efektif dan boros.

2) Efisiensi

yaitu pencapaian hasil yang maksimal dengan sumber daya tertentu atau penggunaan sumber daya terendah untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara hasil atau sumber daya yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3) Efektivitas

yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan dampak.

Tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis (hemat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (meminimalkan penggunaan

sumber daya dan memaksimalkan hasil), serta efektivitas (berhasil mencapai tujuan dan sasaran). Indikator *value for money* dibagi menjadi dua, yaitu (Ardila & Putri, 2015):

1) Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik. Dan efisiensi artinya hasil tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.

2) Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2.1.1.4. Pengukuran *Value for Money*

Adapun pengukuran *value for money* dapat dilakukan dengan beberapa rasio yaitu (Prasetyo et al., 2022):

1) Rasio Ekonomis

Ekonomis adalah perolehan sumber daya tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan antara sumber daya dengan biaya sumber daya yang dinyatakan dalam satuan moneter. Hal ini berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir penggunaan sumber daya yaitu dengan menghindari pengeluaran yang tidak efektif dan boros.

Rasio ini hanya mempertimbangkan sumber daya yang dipergunakan saja. Ekonomis merupakan ukuran yang relatif. Suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis jika dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan biaya yang tidak diperlukan. Jika terjadi peningkatan biaya maka seharusnya ada peningkatan

manfaat yang lebih besar pula. Pengukuran dengan rasio ekonomis membutuhkan data-data berupa anggaran belanja dan realisasi belanja.

Ekonomis berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Pengukuran ekonomi melalui rasi antara masukan aktual dengan yang direncanakan (Ulum, 2012). Kinerja pemerintah daerah dikatakan sangat ekonomis jika rasionya diatas 100%. Hal ini dapat juga dilihat dengan jumlah realisasi atas penerimaan lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Adapun kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja keuangan yaitu:

Tabel 2.1. Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Ekonomis
90% - 99%	Ekonomis
80% - 89%	Cukup Ekonomis
60% - 79%	Kurang Ekonomis
< 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : (Purnamasari et al., 2014)

2) Rasio Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara sesuatu yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya. Dalam pengukuran kinerja dengan metode *value for money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Efisiensi alokasi.

Hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk mempergunakan sumber daya pada tingkat kapasitas optimal.

b) Efisiensi teknis atau manajerial.

Hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk mempergunakan sumber daya pada tingkat hasil tertentu. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga elemen value for money. Karena apabila dibandingkan dengan ekonomis dan efektivitas, efisiensi merupakan salah satu indikator *value for money* yang dapat diukur dengan rasio antara hasil dengan sumber daya.

Semakin besar rasio efisiensi artinya kinerja organisasi tersebut semakin baik. Berikut ini kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efisien
90% - 99%	Efisien
80% - 89%	Cukup Efisien
60% - 79%	Kurang Efisien
< 60%	Tidak Efisien

Sumber : (Purnamasari et al., 2014)

3) Rasio Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegaitan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidak suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Dalam efektivitas hal terpenting

yang harus diketahui yaitu efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Suatu organisasi sektor publik dikatakan sangat efektif dalam menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai diatas seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Adapun kriteria efektivitas kinerja keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 99%	Efektif
80% - 89%	Cukup Efektif
60% - 79%	Kurang Efektif
< 60%	Efektif

Sumber : (Purnamasari et al., 2014)

2.1.2. Kinerja Instansi Pemerintahan

2.1.2.1. Pengertian Kinerja Instansi Pemerintahan

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2017). Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang seperti diharapkan (E. N. Sari et al., 2020).

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pendapat lain mengemukakan bahwa Kinerja instansi pemerintahan merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (Habibie, 2020).

Kinerja instansi pemerintahan adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh para personil atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan operasional perusahaan. Pendapat lain mengatakan bahwa Kinerja instansi pemerintahan adalah kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan(Sinambela et al., 2018).

Secara umum manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Tingkatan manajemen dalam organisasi menurut (Yuniningsih, 2022) membagi manajer menjadi tiga golongan yang berbeda, yaitu :

1. Manajer lini pertama

Tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Manajer lini sering disebut dengan kepala atau pemimpin (*leader*), mandor (*foreman*) dan penyedia (*supervisor*).

2. Manajer menengah

Manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan karyawan operasional. Sebutan lain bagi manajer menengah adalah manajer departemen kepala pengawas dan sebagainya.

3. Manajer puncak

Klasifikasi manajer ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Yang

termasuk dalam manajer puncak adalah direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden, senior dan sebagainya.

2.1.2.2. Tujuan dan Manfaat Kinerja Instansi Pemerintahan

Kinerja instansi pemerintahan merupakan kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial. Dimensi dalam Kinerja instansi pemerintahan menurut (Sonia, 2017) yaitu:

1. Perencanaan

Aktivitas atau tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang guna mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Penyelidikan

Upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mempersiapkan informasi dalam bentuk laporan-laporan, catatan, dan analisa pekerjaan untuk mengukur hasil pelaksanaannya.

3. Koordinasi

Aktivitas menyelaraskan tindakan yang meliputi peraturan informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.

4. Evaluasi

Aktivitas seperti penilaian atas usulan atau kinerja yang diamati dan dilaporkan.

5. Pengawasan

Kegiatan manajerial dalam mengarahkan, memimpin, dan mengembangkan potensi bawahan serta melatih dan menjelaskan aturan-aturan kerja kepada bawahan mengenai pelaksanaan kemampuan kerja.

6. Pemilihan Staf

Aktivitas atau kegiatan manajemen dalam memelihara dan mempertahankan bawahan dalam unit kerja.

7. Negosiasi

Usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan, atau kontrak untuk barang-barang atau jasa.

8. Perwakilan

Aktivitas berupa penyampaian visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan perusahaan-perusahaan lain.

Perilaku manajer diartikan dengan seberapa jauh manajer mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi (Ishak, 2021):

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan sangat dibutuhkan untuk menetapkan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh suatu organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Perencanaan adalah:

- a. Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi.
- b. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

- c. Penyusunan kebijakan yang didasarkan pada kebijakan, tindakan dan jadwal kerja.
- d. Penentuan perencanaan dalam penyusunan organisasi.

Semua Fungsi lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, dimana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat, dan kontiniu. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan yang efektif dari fungsi-fungsi lain.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapatmelaksanakan berbagai program tersebut secara sukses.

Pengorganisasian adalah :

- a. Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan membawa hal-hal tersebut kearah tujuan.
- c. Penugasan tanggung jawab dan promosi kepada setiap karyawan sesuai hasil kerja yang telah mereka laksanakan.

Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan dibagi dan dikoordinasikan. Manajer perlu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan tipe organisasi yang sesuai dengan tujuan rencana dan program yang telah ditetapkan. Perbedaan tujuan akan membutuhkan jenis organisasi yang berbeda pula.

3. Pengarahan

Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengatahan secara sederhana adalah untuk membuat para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan apa yang harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur yaitu :

- a. Penetapan standar pelaksanaan
- b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan
- c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.
- d. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

(Hidayat, 2017) menyatakan bahwa manfaat penilaian kinerja adalah :

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan.

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

2.1.2.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintahan

Menurut pendapat (Friyanty, 2016) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja instansi pemerintahan adalah :

1. Partisipasi anggaran

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil - hasil pembangunan

2. Kejelasan anggaran

Karena begitu luasnya kejelasan anggaran, maka tujuan anggaran harus dinyatakan secara spesifik, jelas dan dapat dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab

3. Umpan balik anggaran

Sasaran anggaran tidak akan tercapai tanpa pemantauan secara terus menerus, kemajuan karyawan akan mencapai tujuan sasaran mereka.

4. Evaluasi anggaran

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen

5. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut; (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi dari operasional dan (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan

2.1.2.4. Indikator Kinerja Instansi Pemerintahan

Kinerja instansi pemerintahan ini diukur dengan mempergunakan indikator sebagai berikut (Sigilipu, 2013):

1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Pengkoordinasian merupakan proses jalinan kerja sama dengan bagian-

bagian lain dalam organisasi melalui tukar-menukar informasi yang dikaitkan dengan penyesuaian program-program kerja.

3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pemimpin terhadap rencana yang telah dibuat dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.
5. Supervisi, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan.
6. Staffing, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.

(Kusnadi & Rahayu, 2021) mengemukakan bahwa ada beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen berdasarkan perspektif non keuangan, yaitu :

1. Kemampuan manajer untuk membuat perencanaan

Perencanaan yang baik dapat meningkatkan focus dan fleksibilitas adalah dua hal yang penting bagi manajer untuk menghadapi lingkungan persaingan yang tinggi dan dinamis. Kemampuan manajer dalam membuat perencanaan dapat menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja manajer.

2. Kemampuan untuk mencapai target

Kinerja manajer dapat diukur dari kemampuan mereka untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Target harus cukup spesifik, melibatkan partisipan, realistik, menantang dan memiliki rentang waktu yang jelas.

3. Kiprah manajer diluar perusahaan

Intensitas manajer dalam mewakili perusahaan untuk berhubungan dengan pihak luar perusahaan menunjukkan kepercayaan perusahaan terhadap manajer tersebut. Kepercayaan tersebut tidak serta merta muncul begitu saja, tetapi muncul atas kinerja yang baik dari manajer itu sendiri. Peranan manajer dalam mewakili perusahaan dapat menjadi salah satu indikator tingkat kinerja manajer tersebut.

2.2. Penelitian terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini adalah :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Sumber
1	(Maryanti & Munandar, 2021)	Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019	Hasilnya penelitian ditinjau dari tingkat ekonomis adalah bahwa pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 Pemerintah Kota Surabaya berhasil mencapai tingkat ekonomis kinerja antara 80% sampai 90% dengan kriteria cukup ekonomis. Kondisi tahun 2019 meningkat menjadi 92,24% yang berarti tingkat ekonomisnya menurun menjadi kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2015 sampai	<i>Jurnal Ilmiah MEA</i> , 5(3), 2886–2899.

			dengan tahun 2019 kurang efisien pada tahun 2015 dan tahun 2017 dan tidak efisien pada tahun 2016, 2018 dan 2019.	
2	(Prasetyo et al., 2022)	Analisis Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Pada Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Puskesmas Penumping Kota Surakarta	Hasil penelitian menunjukkan Kinerja BLUD Puskesmas Penumping Kota Surakarta masuk dalam kategori ekonomis. Pada tingkat efisiensi, Kinerja BLUD Puskesmas Penumping masuk dalam kategori kurang efisien. Pada tingkat efektivitas, kinerja BLUD Puskesmas Penumping masuk dalam kategori kurang efektif.	<i>Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 11(2), 21–27.</i>
3	(Rahman, 2022)	Analisis Value For Money Pada Kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 perhitungan ekonomisdengan nilai rasio sebesar 97,12% dikategorikan ekonomis, perhitungan efisiensi dengan nilairasio sebesar 102,79% dikatakan efisien, dan perhitungan efektivitas dengan nilai rasio sebesar106,76% dikategorikan efektivitas.	Universitas Islam Riau.
4	(Kurniawati & Adhivinna, 2016)	Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Bantul	Pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Bantul dikatakan cukup ekonomis pada tahun anggaran 2010 karena berada pada rentang dibawah 100% . Sedangkan pada tahun anggaran 2011 sampai 2013 dikatakan sangat ekonomis karena berada di atas rentang 100%	<i>Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 13(1).</i>
5	(Perdana et al., 2020)	Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis Value For Money	Hasilnya menunjukkan bahwa (1) ketiga rasio yang diujikanÂ menunjukkan performa yang baik.; (2) perhitungan rasio ekonomis menunjukkan performa keuangan dari Pemerintah Kota Surabaya pada kategori ekonomis, dimana hasilnya konsisten dan cenderung mengalami peningkatan pada rentang 80,71 persen â€“ 88,21 persen; (3) perhitungan rasio	<i>INOVASI, 16(2), 339–346.</i>

			efisiensi menunjukkan performa keuangan Pemerintah Kota Surabaya berada pada kategori sangat efisien, yang dibuktikan dengan rentang penilaian 110,24 persen – 119,19 persen	
--	--	--	--	--

2.3. Kerangka Berfikir

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan kinerja instansi pemerintahan salah satunya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja dalam sebuah instansi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam proses pelaksanaan aktivitas dan kegiatan yang direncanakan, pendapatan merupakan sumber dana yang masuk dan akan menjadi modal untuk pelaksanaan aktivitas, sedangkan belanja adalah pengeluaran atas aktivitas yang akan dilaksanakan (M. Sari, 2015). Dalam mengukur kinerja anggaran dan belanja daerah dapat digunakan konsep *value for money*.

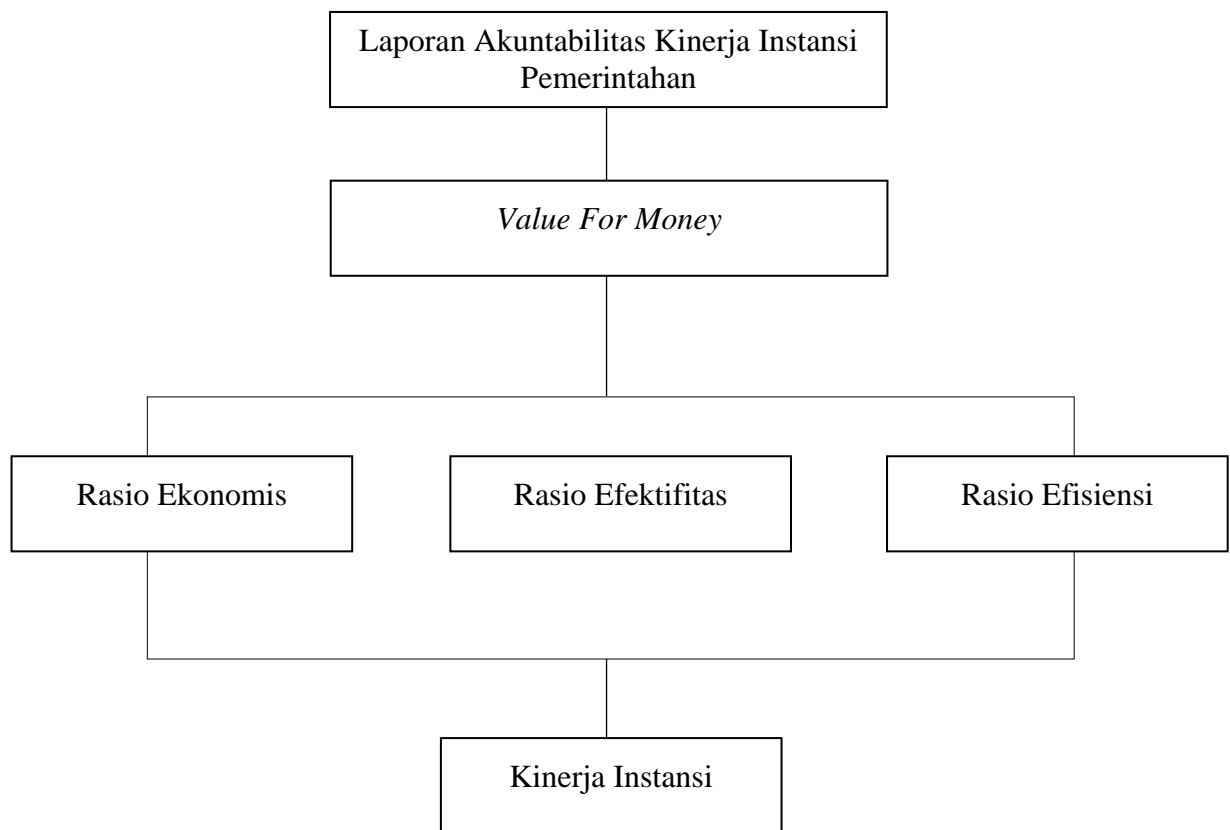
Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah dan merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang di belanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya.

Dalam penelitian ini akan dijelaskan konsep *Value for money* yang dikenal dengan 3 E (Rahman, 2022). Pertama, rasio ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang di capai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Kedua, rasio efektivitas menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan targetnya. Kemampuan daerah dalam menjalani tugasnya di katagorikan efektif apabila rasio yang dicapai melebihi seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Ketiga, rasio efisiensi menggambarkan antara besarnya biaya yang di keluarkan dengan realisasi pendapatan yang di terima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisien apabila rasio yang di capai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Kurniawati & Adhivinna, 2016).

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui Kinerja Instansi Pemerintahan pada BAPPEDA Kota Medan. Jika semua rasio di atas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Bener Meriah dapat dikatakan baik. Berdasarkan uraian di atas, gagasan tersebut dapat digambarkan sebagai kerangka berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiono, 2016), yaitu penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis guna memberikan gambaran yang cukup jelas tentang objek penelitian. Data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan angka, yang sifatnya menunjukkan gambaran angka atau nilai kuantitatif tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan kinerja instansi pemerintahan melalui *Value for money*.

3.2. Definisi Operasional

Defenisi operasional itu adalah defenisi yang menjelaskan bagaimana variabel itu dapat di ukur, dengan memberi arti atau penjelasan kegiatan dengan tujuan untuk melihat pentingnya variabel yang di gunakan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nantinya.

Value For Money

Value for money merupakan pengukuran laporan realisasi anggaran yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran yang di belanjakan menghasilkan suatu manfaat bagi masyarakatnya. Berikut akan di jelaskan konsep *Value for money* yang dikenal dengan 3 E.

a. Rasio Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya.

Adapun rumus rasio ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi membandingkan antara besarnya biaya yang di keluarkan dengan pendapatan yang terealisasi.

Adapun rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan targetnya.

Adapun rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada BAPPEDA Kota Medan yang berlokasi di Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1, Petisah Tengah, Kec.nMedan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231.

3.3.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2023 , dengan rencana sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Rencana Penelitian

No	Proses Penelitian	Waktu Penelitian																					
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1.	Pengajuan Judul	■	■																				
2.	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■														
3.	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■							
4.	Seminar Proposal																	■	■	■	■		
5.	Revisi Proposal																		■	■	■		
6.	Pengumpulan Data																				■		
7.	Penyusunan Skripsi																				■	■	
8.	Bimbingan Skripsi																				■	■	■
9.	Sidang Meja Hijau																						■

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yaitu:

- a. Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau nominal.

Data yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan

- b. Data Kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa wawancara langsung ke pihak terkait di BAPPEDA Kota Medan seperti struktur organisasi dan sebagainya. .

3.4.2. Sumber data

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data primer merupakan sumber data langsung yang diperoleh peneliti secara langsung dengan langsung ke lapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara:

- a) Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan laporan APBD yang berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari BAPPEDA Kota Medan untuk keperluan pembahasan penelitian.
- b) Wawancara, yaitu melakukan komunikasi langsung dua arah kepada narasumber dan informan, dalam hal ini pihak SDM di BAPPEDA Kota Medan terkait fenomena awal penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2012) “Teknik analisis deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan mengumpulkan data terlebih dahulu yang

kemudian diklarifikasi, dianalisis yang selanjutnya diinterpretasikan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang di teliti.

Adapun tahapan dalam analisis data sebagai berikut :

1. Melakukan tabulasi data dengan menghitung ke dalam rumus pengukuran *value for money*
2. Menganalisis data menggunakan pengukuran *value for money*
3. Melakukan interpretasi data atas pengukuran *value for money*
4. Memberikan keterangan mengenai data yang penulis peroleh
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum BAPPEDA Kota Medan

Bappeda berdiri pada tahun 1986 di jurnalistik Medan dan kemudian ke Gelanggang Remaja dan pada Tahun 1991 pindah ke Kantor Walikota Medan Bappeda Kota Medan sebagaimana termasuk dalam pada Kota Medan Nomor 5 Tahun 2001 dan Keputusan Walikota Medan. Bappeda memiliki tugas membantu Walikota Medan untuk menentukan arah dan kebijakan di bidang Bappeda Kota serta penilaiannya. Bappeda Kota Medan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Medan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah. Perencanaan Bappeda Kota Medan tertuang dalam dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2001 sampai 2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rapat Kerja Nasional, Tugas Akhir masa jabatan Walikota Medan, Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan, Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda, Pelaksanaan Koordinasi Tata Laksana dan Tata Ruang, Pengkoordinasian Lingkup Kota, Industri, Perekonomian, Rencana Anggaran Belanja Negara 9 (RAPBD), Sumber Daya Alam (SDA), Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengumpulan data-data yang berkaitan dengan kota medan (Kota, Kecamatan, Kabupaten Dalam Angka).

4.1.2. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan *value for money* pada BAPPEDA Kota Medan. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Rahman, 2022). Adapun tiga elemen utama dalam *value for money*, yaitu sebagai berikut:

1) Rasio Ekonomis

Rasio Ekonomis yaitu perolehan sumber daya dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan antara realisasi belanja daerah dan anggaran belanja daerah. Hal ini berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir penggunaan sumber daya yaitu dengan menghindari pengeluaran yang tidak efektif dan boros.

Rasio ini hanya mempertimbangkan sumber daya yang dipergunakan saja. Ekonomis merupakan ukuran yang relatif. Suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis jika dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan biaya yang tidak diperlukan. Jika terjadi peningkatan biaya maka seharusnya ada peningkatan manfaat yang lebih besar pula. Pengukuran dengan rasio ekonomis membutuhkan data-data berupa anggaran belanja dan realisasi belanja.

Ekonomis berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Pengukuran ekonomi melalui rasi antara masukan aktual dengan yang direncanakan (Ulum, 2012). Kinerja pemerintah daerah dikatakan sangat ekonomis jika rasionya diatas 100%. Hal ini dapat juga dilihat dengan

jumlah realisasi atas penerimaan lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Adapun rumus rasio ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio ekonomis dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Kota Medan, dan berikut diuraikan perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ekonomis Tahun 2018} &= \frac{12.240.828.664}{18.161.993.786} \times 100\% \\ &= 67,4\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio ekonomis di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 67,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis di tahun 2018 adalah kurang ekonomis.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ekonomis Tahun 2019} &= \frac{13.689.194.382}{20.001.322.735} \times 100\% \\ &= 68,4\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio ekonomis di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 68,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis di tahun 2019 adalah kurang ekonomis.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ekonomis Tahun 2020} &= \frac{12.876.730.142}{19.476.527.595} \times 100\% \\ &= 66,1\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio ekonomis di tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 66,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis di tahun 2020 adalah kurang ekonomis.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ekonomis Tahun 2021} &= \frac{16.386.575.629}{24.292.278.919} \times 100\% \\ &= 67,5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio ekonomis di tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 67,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis di tahun 2021 adalah kurang ekonomis.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ekonomis Tahun 2022} &= \frac{25.005.731.674}{27.213.216.618} \times 100\% \\ &= 91,9\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio ekonomis di tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 91,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis di tahun 2022 adalah ekonomis.

Tabel 4.1. Rasio Ekonomis BAPPEDA Kota Medan

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Ekonomis
2018	12.240.828.664	18,161,993,786	67.4%
2019	13.689.194.382	20,001,322,735	68.4%
2020	12.876.730.142	19,476,527,595	66.1%
2021	16.386.575.629	24,292,278,919	67.5%
2022	25.005.731.674	27,213,216,618	91.9%
Rata-rata			72,3%

Sumber : LRA BAPPEDA Kota Medan (2023)

Berdasarkan perhitungan di atas terkait kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau Rasio ekonomis tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 72,3%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori kurang ekonomis.

2) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi yaitu pencapaian hasil yang maksimal dengan sumber daya tertentu atau penggunaan sumber daya terendah untuk mencapai hasil

tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara hasil atau sumber daya yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara sesuatu yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya. Dalam pengukuran kinerja dengan metode *value for money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

c) Efisiensi alokasi.

Hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk mempergunakan sumber daya pada tingkat kapasitas optimal.

d) Efisiensi teknis atau manajerial.

Hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk mempergunakan sumber daya pada tingkat hasil tertentu. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga elemen *value for money*. Karena apabila dibandingkan dengan ekonomis dan efektivitas, efisiensi merupakan salah satu indikator *value for money* yang dapat diukur dengan rasio antara hasil dengan sumber daya.

Rasio efisiensi membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang terealisasi.

Adapun rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Kota Medan, dan berikut diuraikan perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Tahun 2018} &= \frac{12.240.828.664}{3,680,590,700} \times 100\% \\ &= 30,1\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 30,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2018 adalah tidak efisien.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Tahun 2019} &= \frac{13.689.194.382}{3,901,684,751} \times 100\% \\ &= 28,5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 28,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2019 adalah tidak efisien.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Tahun 2020} &= \frac{12.876.730.142}{4,121,585,751} \times 100\% \\ &= 32,0\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 32,0%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2020 adalah tidak efisien.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Tahun 2021} &= \frac{16.386.575.629}{5,021,257,837} \times 100\% \\ &= 30,6\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 30,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2021 adalah tidak efisien.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Tahun 2022} &= \frac{25.005.731.674}{5,657,816,889} \times 100\% \\ &= 22,6\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 22,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2022 adalah tidak efisien.

Tabel 4.2. Rasio Efisiensi BAPPEDA Kota Medan

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
2018	12.240.828.664	3,680,590,700	30.1%
2019	13.689.194.382	3,901,684,751	28.5%
2020	12.876.730.142	4,121,585,751	32.0%
2021	16.386.575.629	5,021,257,837	30.6%
2022	25.005.731.674	5,657,816,889	22.6%
Rata-rata			28.8%

Sumber : LRA BAPPEDA Kota Medan (2023)

Berdasarkan perhitungan di atas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau dari Rasio efisiensi tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 28,6%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori tidak efisien.

3) Rasio efektivitas

Rasio efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan dampak. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas

merupakan ukuran berhasil atau tidak suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Dalam efektivitas hal terpenting yang harus diketahui yaitu efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan (Purnamasari et al., 2014).

Suatu organisasi sektor publik dikatakan sangat efektif dalam menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai diatas seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan targetnya.

Adapun rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Kota Medan, dan berikut diuraikan perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas Tahun 2018} &= \frac{3,680,590,700}{4,657,852,400} \times 100\% \\ &= 79,0\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 79,0%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektifitas di tahun 2018 adalah cukup efektif.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas Tahun 2019} &= \frac{3,901,684,751}{4,727,852,448} \times 100\% \\ &= 82,5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 82,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di tahun 2019 adalah cukup efektif.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas Tahun 2020} &= \frac{4,121,585,751}{4,857,552,448} \times 100\% \\ &= 84,8\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal di tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 84,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di tahun 2020 adalah cukup efektif.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas Tahun 2021} &= \frac{5,021,257,837}{5,208,964,175} \times 100\% \\ &= 96,4\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal di tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 96,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di tahun 2021 adalah efektif.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas Tahun 2022} &= \frac{5,657,816,889}{6,522,123,770} \times 100\% \\ &= 86,7\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal di tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 86,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di tahun 2022 adalah cukup efektif.

Tabel 4.3. Rasio Efektifitas BAPPEDA Kota Medan

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah	Rasio Efektifitas
2018	3,680,590,700	4,657,852,400	79.0%
2019	3,901,684,751	4,727,852,448	82.5%
2020	4,121,585,751	4,857,552,448	84.8%
2021	5,021,257,837	5,208,964,175	96.4%
2022	5,657,816,889	6,522,123,770	86.7%
Rata-rata			85,9%

Sumber : LRA BAPPEDA Kota Medan (2023)

Berdasarkan perhitungan di atas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau dari Rasio Daerah dinilai dari Rasio Belanja Modal

tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 85,9%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektifitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori cukup efektif.

4. Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kota Medan

Pada BAPPEDA Kota Medan, belanja merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembangunan daerah Kota Medan yang apabila jumlah anggaran yang diminta tidak sesuai dengan yang direalisasikan berarti ada beberapa anggaran pembangunan yang tidak sesuai dengan perhitungan anggaran biaya yang dianggarkan.

Berikut data laporan realisasi anggaran belanja daerah BAPPEDA Kota Medan :

Tabel 4.4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah BAPPEDA Kota Medan (dalam ribuan)

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2018	4,657,852,400	3,680,590,700	18,161,993,786	12,240,828,664
2019	4,727,852,448	3,901,684,751	20,001,322,735	13,689,194,382
2020	4,857,552,448	4,121,585,751	19,476,527,595	12,876,730,142
2021	5,208,964,175	5,021,257,837	24,292,278,919	16,386,575,629
2022	6,522,123,770	5,657,816,889	27,213,216,618	25,005,731,674

Sumber : BAPPEDA Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun jumlah anggaran dan realisasi belanja selalu lebih besar dari anggaran dan pendapatan di BAPPEDA Kota Medan, pada tahun 2018 anggaran belanja sebesar Rp.18,161,993,786 dan realisasi belanja sebesar Rp.12,240,828,664, dan anggaran pendapatan sangat rendah sebesar Rp.4,657,852,400, begitu juga dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.3,680,590,700. Kemudian pada tahun 2019 anggaran belanja sebesar Rp.20,001,322,735 dan realisasi belanja sebesar

Rp.13,689,194,382, dan anggaran pendapatan sangar rendah sebesar Rp.4,727,852,448, begitu juga dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.3,901,684,751. pada tahun 2020 anggaran belanja sebesar Rp. 19,476,527,595 dan realisasi belanja sebesar Rp.12,876,730,142, dan anggaran pendapatan sangar rendah sebesar Rp.4,857,552,448, begitu juga dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.4,121,585,751. pada tahun 2021 anggaran belanja sebesar Rp. 24,292,278,919 dan realisasi belanja sebesar Rp.16,386,575,629, dan anggaran pendapatan sangar rendah sebesar Rp.5,208,964,175, begitu juga dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.5,021,257,837. pada tahun 2022 anggaran belanja sebesar Rp.27,213,216,618 dan realisasi belanja sebesar Rp.25,005,731,674, dan anggaran pendapatan sangar rendah sebesar Rp.6,522,123,770, begitu juga dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.5,657,816,889, dari data tersebut artinya dalam hal pengeluaran belanja BAPPEDA Kota Medan tidak mengandalkan pendapatan internal tapi berdasarkan dana transfer daerah maupun dari kementerian.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan *value for money* pada BAPPEDA Kota Medan

Melalui konsep *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran dana yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat. Organisasi sektor publik sering dinilai sebagai tempat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. Sehingga muncul tuntutan baru agar organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan metode *value for money*, selain penilaian kinerja yang bersifat finansial terdapat juga penilaian kinerja yang

bersifat non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten seperti memenuhi ekspektasi pelanggan sasaran.

Berdasarkan perhitungan terkait kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau Rasio ekonomis tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 72,3%, rasio ini berada di bawah standar rasio ekonomis yaitu 90-100%, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori kurang ekonomis yang artinya realisasi belanja memiliki nilai yang lebih rendah dari belanja yang dianggarkan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pekerjaan yang tidak maksimal dalam pembangunan yang direncanakan, hal ini dapat dicontohkan seperti misalnya pemerintah ingin membangun sebuah pra sarana dengan anggaran belanja pembangunannya sebesar Rp. 1.000.000.000, namun ternyata anggaran belanja yang mampu diserap hanya Rp. 800.000.000, tentunya hal ini akan membuat kualitas pembangunan tersebut tidak sesuai yang dianggarkan. Namun jika rasio ekonomis berada di atas standar artinya instansi akan dapat dengan mudah melaksanakan pembangunan dengan kualitas yang baik sesuai dengan yang dianggarkan.

Kemudian, ditinjau dari Rasio efisiensi tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 28,6%, rasio ini berada jauh di bawah standar rasio efisiensi yaitu 90-100% sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori tidak efisien yang artinya belanja daerah jauh lebih besar daripada

pendapatannya sehingga akan menyebabkan kekurangan dana dalam perencanaan pembangunan, sebaliknya jika rasio efisiensi berada di atas standar maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan akan dapat dengan mudah melakukan pembangunan yang lebih cepat di Kota Medan.

Kemudian, ditinjau dari Rasio Daerah dinilai dari Rasio Belanja Modal tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 85,9%, rasio ini berada jauh di bawah standar rasio efektifitas yaitu 90-100% dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektifitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori cukup efektif. Artinya realisasi pendapatan pada BAPPEDA Kota Medan tidak jauh dari yang dianggarkan walau masih dibawah standar rasio efektifitas, sehingga akan berdampak pada penambahan kas dalam pembangunan, namun jika rasio efektifitas berada di atas standar, artinya BAPPEDA Kota Medan akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam rencana-rencana pembangunan dari apa yang telah dianggarkan.

4.2.2. Penyebab Rasio-Rasio *Value For Money* Berada Dibawah Standart Pada Bappeda Kota Medan

Pada laporan realisasi anggar di BAPPEDA Kota Medan realisasi belanja daerah selalu tidak sesuai dengan yang dianggarkan, hal ini tentunya kan berdampak kepada proses pembangunan yang tidak maksimal jika tidak sesuai dengan anggaran. Hal ini dapat dilihat pada rasio ekonomis, dimana dalam rasio ekonomis tidak mencapai target dan di bawah standar, pada tahun 2018 rasio ekonomis sebesar 67,4%, kemudian tahun 2019 rasio ekonomis sebesar 68,4%, kemudian tahun 2020 rasio ekonomis sebesar 66,1%, kemudian tahun 2021 rasio ekonomis sebesar 67,5%, dari tahun 2018-2021 rasio ekonomis dinilai kurang

ekonomis, hal ini disebabkan oleh serapan dana belanja daerah tidak sesuai dengan yang dianggarkan akibat kurangnya dana yang didapatkan dan lemahnya proses perencanaan anggaran belanja daerah dalam memprediksi sumber pendapatan dari transferk keuangan daerah, namun kemudian tahun 2022 rasio ekonomis meningkat sebesar 91,9% yang berarti rasio ekonomis berada dalam kategori ekonomis, hal ini disebabkan oleh telah turunnya transfer keuangan daerah dari pusat ke Kota Medan. Rasio ekonomis berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Pengukuran ekonomi melalui rasio antara masukan aktual dengan yang direncanakan (Ulum, 2012). Sehingga semakin besar rasio ekonomis akan memberikan pemasukan yang besar dan mempermudah menjalankan kegiatan pembangunan yang direncanakan

Kemudian pada rasio efisiensi di setiap tahun berada pada kategori kurang efisien, dimana rasio efisiensi di tahun 2018 sebesar 30,1%, kemudian 2019 sebesar 28,5%, kemudian 2020 sebesar 32,0% kemudian 2021 sebesar 30,6% kemudian 2022 sebesar 22,6%. Hal ini disebabkan oleh tingginya belanja daerah yang berhasil diserap dan bukan berasal dari pendapatan di BAPPEDA, namun bersumber dari dana transfer daerah dari kementrian, sehingga belanja daerah jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatannya dan juga proses tender yang lambat yang terjadi dalam proses pembangunan. Dengan demikian semakin besar rasio efisiensi artinya kinerja organisasi tersebut semakin baik karena mampu menyerap belanja sesuai dengan yang dianggarkan. (Purnamasari et al., 2014)

Dan pada rasio efektifitas di tahun 2018, 2019, 2020 dan 2022 berada dalam kategori cukup efektif dimana pada tahun 2018 rasio efektifitas sebesar 79,0%, kemudian pada tahun 2019 rasio efektifitas sebesar 82,5%, kemudian pada

tahun 2020 rasio efektifitas sebesar 84,8% dan pada tahun 2022 rasio efektifitas sebesar 86,7%, adapun hal ini disebabkan oleh penerimaan pendapatan yang terhambat dan terlambat karena prosedur yang panjang. Dengan demikian Semakin tinggi rasio efektifitas maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. (Purnamasari et al., 2014).

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan *value for money* dengan rasio ekonomis pada BAPPEDA Kota Medan berada dalam kategori kurang ekonomis.
2. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan *value for money* dengan rasio efisiensi pada BAPPEDA Kota Medan berada dalam kategori tidak efisien.
3. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan *value for money* dengan rasio efektifitas pada BAPPEDA Kota Medan berada dalam kategori cukup efektif.
4. Penyebabnya tidak tercapainya realisasi belanja pada BAPPEDA Kota Medan antara lain dikarenakan lemahnya perencanaan anggaran, proses tender yang lambat, transfer keuangan daerah dari pusat yang terlambat dan analisa standar biaya yang belum tepat

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sajikan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh BAPPEDA Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan *value for money*, diperlukan penyesuaian pengeluaran

belanja operasi agar tidak terlalu besar dan pelaksanaan anggaran tidak hanya untuk aktifitas operasional saja.

2. Berkaitan dengan tingkat realisasi belanja daerah, agar semua unsur terkait dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik sehingga memberikan dampak terhadap pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien serta tepat waktu.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel dan isu permasalahan agar mendapatkan informasi yang lebih luas terkait penerapan akuntansi pada instansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan value for money pada pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1).
- Biduri, S. (2011). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Variabel Pemoderasi Gaya Kepemimpinan Dan Komitmen Organisasi Pada Pemkab Lamongan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Issn 1829–9857 Sektor Publik (JAMBSP)*, 8(1).
- Biduri, S. (2018). Akuntansi sektor publik. *Umsida Press*, 1–197.
- Friyanty, I. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Manajerial aparat pemerintahan (studi kasus pemerintah daerah indramayu). *Jurnal Tekun Universitas Mercu Buana*, 7(01), 62–79.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik; Teori, Konsep dan Aplikasinya. *Salemba Empat. Jakarta*.
- Hanum, Z. & Ritonga, P. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Kampus Islam Swasta di Kota Medan. *Seminar Nasional Teknologi ...*, 1, 811–816.
- Hidayat, B. (2017). Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard pada Koperasi Karyawan Tirta Mahakam di Bukuan. *Ekonomia*, 6(2), 345–351.
- Ishak, P. (2021). *Kinerja manajerial: ditinjau dari karakteristik sistem akuntansi manajemen, activity based management, desentralisasi*. Cv. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Kurniawati, N., & Adhivinna, V. V. (2016). Analisis Penerapan Konsep Value For Money pada Pemerintah Kabupaten Bantul. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1).
- Kusnadi, B. O. P., & Rahayu, Y. (2021). Perspektif Balanced Scorecard Sebagai Pengukuran Kinerja Organisasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1).
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya.
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(3), 2886–2899.

- Perdana, T. A. & Putra, F. I. F. S. (2020). Mengukur kinerja apbd kota surabaya analisis value for money. *INOVASI*, 16(2), 339–346.
- Prasetyo, A. & Masitoh, E. (2022). Analisis Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Pada Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Puskesmas Penumpang Kota Surakarta. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 21–27.
- Purnamasari, I. D. M. I. & Cipta, W. (2014). Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value for Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 2(1).
- Putry, N. A. C., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap opini audit dan kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 12(1), 25–34.
- Rahman, I. A. (2022). *Analisis Value For Money Pada Kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*. Universitas Islam Riau.
- Sari, E. N. & Astuty, W. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 107–126.
- Sari, M. (2015). Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Prosiding Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 60, 569–577.
- Setiawati, B. (2020). Optimalisasi Kinerja Pelayanan Di Sektor Publik Berbasis Pelaku (Individu). *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 4(1), 53–64.
- Sigilipu, S. (2013). Pengaruh penerapan informasi akuntansi manajemen dan sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Sinambela, E. & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Sonia, S. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen serta Implikasinya terhadap Kinerja Manajerial. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 1(3), 90–107.

- Sugiono. (2016). *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif* (Cet.23 (ed.)). alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif. In *Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*.
- Ulum, I. (2012). Konstruksi komponen intellectual capital untuk perguruan tinggi di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, 2(2), 251–261.
- Yuniningsih, A. T. (2022). Tingkatan Manajemen Dan Bidang-Bidang Manajemen. *Dasar-Dasar Manajemen (Suatu Pengantar)*, 29.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.03	Perencanaan
Unit Organisasi : 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
2	BELANJA	18.161.993.786,00	12.240.828.664,00	67,40	12.095.770.522,00
2.1	BELANJA OPERASI	17.871.437.786,00	12.112.028.664,00	67,77	11.655.313.672,00
2.1.1	Belanja Pegawai	10.929.044.000,00	8.531.407.154,00	78,06	8.120.632.533,00
2.1.2	Belanja Barang	6.942.393.786,00	3.580.621.510,00	51,58	3.534.681.139,00
2.2	BELANJA MODAL	290.556.000,00	128.800.000,00	44,33	440.456.850,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	290.556.000,00	128.800.000,00	44,33	440.456.850,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.161.993.786,00)	(12.240.828.664,00)	67,40	(12.095.770.522,00)
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)	(18.161.993.786,00)	(12.240.828.664,00)	67,40	(12.095.770.522,00)

MEDAN, 31 Desember 2018
PIH. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN

Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM

NIP. 196607121990031004

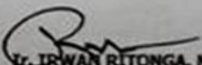


PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5	BELANJA	20.001.322.735,00	13.689.194.382,00	68,44	12.240.828.664,00
5.1	BELANJA OPERASI	19.727.426.270,00	13.487.680.282,00	68,37	12.112.028.664,00
5.1.1	Belanja Pegawai	9.057.419.000,00	7.620.836.380,00	84,14	7.140.542.714,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.670.007.270,00	5.866.843.902,00	54,98	4.971.385.950,00
5.2	BELANJA MODAL	273.896.465,00	201.514.100,00	73,57	128.800.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273.896.465,00	201.514.100,00	73,57	128.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.001.322.735,00)	(13.689.194.382,00)	68,44	(12.240.828.664,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(20.001.322.735,00)	(13.689.194.382,00)	68,44	(12.240.828.664,00)

MEDAN, 31 Desember 2019
Kepala Bappeda Kota Medan


Ir. IRWAN RITONGA, M.Si
NIP. 19630428 199203 1 002



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Didang Pemerintahan : 4.03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5	BELANJA	19.476.527.595,00	12.876.730.142,00	66,11	13.689.194.382,00
5.1	BELANJA OPERASI	19.276.527.195,00	12.685.230.142,00	65,81	13.487.690.282,00
5.1.1	Belanja Pegawai	9.057.419.000,00	7.345.085.279,00	81,09	7.620.936.380,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.219.108.195,00	5.340.144.863,00	52,26	5.866.943.902,00
5.2	BELANJA MODAL	200.000.400,00	191.500.000,00	95,75	201.514.100,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.400,00	191.500.000,00	95,75	201.514.100,00
	SURPLUS / (DEPISIT)	(19.476.527.595,00)	(12.876.730.142,00)	66,11	(13.689.194.382,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(19.476.527.595,00)	(12.876.730.142,00)	66,11	(13.689.194.382,00)

MEDAN, 31 Desember 2020
Kepala Bappeda Kota Medan


Ir. IRWAN RITONGA, M.Si
NIP. 19630428 199203 1 002



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	BELANJA DAERAH	24.292.278.919,00	16.386.573.629,00	67,46	12.876.730.142,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	23.465.838.419,00	15.591.444.629,00	66,44	12.685.230.142,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.307.179.000,00	7.623.064.251,00	81,91	7.370.985.279,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.158.659.419,00	7.968.380.378,00	56,28	5.314.244.863,00
5 . 2	BELANJA MODAL	826.440.500,00	795.129.000,00	96,21	191.500.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	815.640.500,00	795.129.000,00	97,49	191.500.000,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.292.278.919,00)	(16.386.573.629,00)	67,46	(12.876.730.142,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.292.278.919,00)	(16.386.573.629,00)	67,46	(12.876.730.142,00)

Medan, 31 Desember 2021
**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Medan**

BENNY ISKANDAR,ST,MT

NIP. 19740429 200003 1 008



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
SKPD : 5-01.0-00.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unit Organisasi : 5-01.0-00.0-00.01.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-01.0-00.0-00.01.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH	27.213.218.618,00	25.005.731.674,00	91,89	16.386.573.629,00
5.1	BELANJA OPERASI	25.888.582.618,00	23.770.707.164,00	91,82	15.591.444.629,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.864.488.775,00	9.345.999.598,00	94,74	7.623.064.251,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.024.093.843,00	14.424.707.566,00	90,02	7.968.380.378,00
5.2	BELANJA MODAL	1.324.636.000,00	1.235.024.510,00	93,24	795.129.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.324.636.000,00	1.235.024.510,00	93,24	795.129.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(27.213.218.618,00)	(25.005.731.674,00)	0	(16.386.573.629,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(27.213.218.618,00)	(25.005.731.674,00)	0	(16.386.573.629,00)

Medan , 30 Desember 2022
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


BENNY ISKANDAR, S.T., M.T.
NIP. 197404292000031008





PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/01/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 13/01/2023

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Audi Nur Khalis
NPM : 1905170059
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Kurangnya penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, 2. Kurangnya pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, 3. Kurangnya pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.
- Rencana Judul : 1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja
2. Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja
3. Analisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap

Objek/Lokasi Penelitian : Bappeda Kantor Walikota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Audi Nur Khalis)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

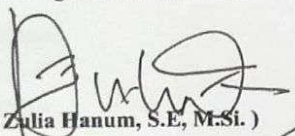
Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/01/2023

Nama Mahasiswa : Audi Nur Khalis
 NPM : 1905170059
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Tanggal Pengajuan Judul : 13/01/2023
 Nama Dosen pembimbing*) : Isna Ardila, SE., M.Si (19 Januari 2023)

Judul Disetujui**)

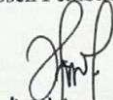
: Analisis Value For Money Pada Laporan
 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah Kota Medan

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi


 (Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing


 (Isna Ardila, SE., M.Si)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20



UMSU
Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	:	A U D I N U R K H A L I S
NPM	:	1 9 0 5 1 7 0 0 5 9
Tempat/Tgl Lahir	:	M E K A R S A R I 0 9 O K T O B E R 2 0 0 1
Program Studi	:	Akuntansi
Alamat Mahasiswa	:	J L L E S T A R I D S I V
Tempat Penelitian:	:	B A D A N R I S E T D A N I N O V A S I D A E R A H K O T A M E D A N
Alamat Penelitian	:	J L J E N D R A L B E S A R A H N A S V T I O N N O 3 2 M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

(Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.,)

Wassalam
Pemohon

AUDI NUR KHALIS)



UMSU
Pegawai / Cendekia / Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/RI/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 620/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 10 Sya'ban 1444 H
02 Maret 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Jln. Jendral Besar A.H. Nasution No. 32 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Audi Nur Khalis
Npm : 1905170059
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Peringgal



Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Qualifications Agency





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 622/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 1 Maret 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Audi Nur Khalis
N P M : 1905170059
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan

Dosen Pembimbing : **Isna Ardila, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **02 Maret 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Sya'ban 1444 H
02 Maret 2023 M



Dekan

Drs. H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal





PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution No. 32 Medan Kode Pos 20233
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN PRA RISET

NOMOR : 070/446/BRIDA/2023

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 620/II.3-AU/UMSU-05/F/2023. Tanggal: 02 Maret 2023. Hal: Izin Riset Pendahuluan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Keterangan Riset.

Nama : Audi Nur Khalis.
NPM : 1905170059.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.
Judul : "Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan".
Lamanya : 3 (tiga) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Pra Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Pra Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Pra Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Pra Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pra Riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email (bridamedan@gmail.com).
5. Surat keterangan Pra Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Pra Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution No. 32 Medan Kode Pos 20233
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN PRA RISET

NOMOR : 070/46/BRIDA/2023

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 620/II.3-AU/UMSU-05/F/2023. Tanggal: 02 Maret 2023. Hal: Izin Riset Pendahuluan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Keterangan Riset.

Nama : Audi Nur Khalis.
NPM : 1905170059.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.
Judul : "Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan".
Lamanya : 3 (tiga) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Pra Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Pra Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Pra Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Pra Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pra Riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email (bridamedan@gmail.com).
5. Surat keterangan Pra Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Pra Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Lt. III Medan, Kode Pos – 20112
Telepon. (061) 4535774 Faks. (061) 4539406, Email : bappedamedan@gmail.com
Website : pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 3120

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Audi Nur Khalis
NIM : 1905170059
Jurusan : Akuntansi

Sesuai dengan Surat Rekomendasi Permohonan Izin Pra Riset yang diterbitkan Kepala Bripda Kota Medan Nomor : 070/434/Balitbang/2023 tanggal 07 Maret 2023 tentang Surat Permohonan Riset dari tanggal 07 Maret s/d 07 Mei 2023, benar telah melakukan Riset di Bappeda Kota Medan dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan dengan seperlunya dan dimaklumi.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 22 Juni 2023

an. KEPALA BAPPEDA KOTA MEDAN
SEKRETARIS


Drs. M. SYAFRUDDIN, MSI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196705251993031006



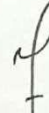


Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UMSU
2. Yang bersangkutan
3. Pertinggal

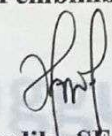
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa
N P M
Dosen Pembimbing
Program Studi
Konsentrasi
Judul Penelitian

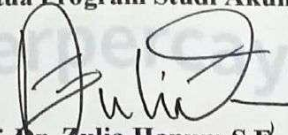
: AUDI NUR KHALIS
: 1905170059
: ISNA ARDILA, SE., M.Si
: AKUNTANSI
: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
: ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Penjelasan terkait pendapatan & Belanja BAPPEDA, - Data masalah belum jelas - teori pendukung masalah	13 Juni	
Bab 2	- teori - teori VFM - kelayakan berfungsinya -	14 Juni	
Bab 3	- Definisi operasional - jenis & sumber data - teknik analisis data	11 Juli	
Daftar Pustaka	Aplikasi Mendeley	25 Juli	
Persetujuan Seminar Proposal	selesai Bimbingan proposal & akan masuk di seminar	3 Agustus	

Dosen Pembimbing Skripsi


(Isna Ardila, SE., M.Si)

Medan, 2023
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 14 Agustus 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi
 menerangkan bahwa :

Nama : *Audi Nur Khalis*
 NPM : *1905170059*
 Tempat / Tgl.Lahir : *Mekar Sari, 09 Oktober 2001*
 Alamat Rumah : *Jln. Lestari DS.IV*
 Judul Proposal : *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan*
 Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Abstrak</i>
Bab I	<i>Identifikasi masalah tujuan penelitian rumusan masalah</i>
Bab II	<i>kerangka teoritis</i>
Bab III
Lainnya	<i>kebaruan penelitian sesuai buku pedoman</i>
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 14 Agustus 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Isna Ardilla, SE., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 14 Agustus 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Audi Nur Khalis
NPM : 1905170059
Tempat / Tgl.Lahir : Mekar Sari, 09 Oktober 2001
Alamat Rumah : Jln. Lestari DS.IV
Judul Proposal : Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan

proposal dinyatakan sah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Isna Ardilla, SE., M.Si*

Medan, 14 Agustus 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Isna Ardilla, SE., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



PENGESAHAN PROPOSAL

berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 14 Agustus 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Audi Nur Khalis
NPM : 1905170059
Tempat / Tgl.Lahir : Mekar Sari, 09 Oktober 2001
Alamat Rumah : Jln. Lestari DS.IV
Judul Proposal : Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Isna Ardilla, SE., M.Si*

Medan, 14 Agustus 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Isna Ardilla, SE., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode
Pos 20143 Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 000.9/1777

Berdasarkan Surat Keterangan Pra Riset dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 070/1979/BRIDA/2023 Tanggal 25 Oktober 2022, dengan ini menerangkan kepada nama di bawah ini :

Nama : **Audi Nur Khalis**
NPM : 1905170059
Program Studi : Akuntansi
Lokasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.
Lamanya : 40 (empat puluh) Hari
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Riset di Pemerintah Kota Medan.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN,**

MANSURSYAH, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Arsip.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggantikan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Lt. III Medan, Kode Pos – 20112
Telepon. (061) 4535774 Faks. (061) 4539406, Email : bappedamedan@gmail.com
Website : pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 4157

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Audi Nur Khalis
NIM : 1905170059
Jurusan : Akuntansi

Sesuai dengan surat rekomendasi penelitian yang diterbitkan Kepala Balitbang Kota Medan Nomor 000.9/1793 tanggal 01 September 2023 tentang Rekomendasi Penelitian serta yang bersangkutan telah melakukan Pengambilan data dan telah selesai dengan baik di Bappeda Kota Medan .

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan dengan seperlunya dan dimaklumi.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 4 September 2023

An **KEPALA BAPPEDA KOTA MEDAN**
Sekretaris



Dfs. M. SYAFRUDDIN, M.Si
PEMBINA TK.1
NIP. 19670525 199303 1006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Audi Nur Khalis
Tempat/Tanggal Lahir : Mekar Sari, 09 Oktober 2001
NPM : 1905170059
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1 Dari 2 Bersaudara
Alamat : Jl. Lestari DS.IV
No. Telepon : 081375266696
E-Mail : audinurkhalis@gmail.com

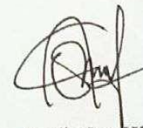
Data Orang Tua

Nama Ayah : Hendri Antoni
Nama Ibu : Tri Astuti
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Lestari DS.IV

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2007 – 2013 : SD Negeri 104213
2. Tahun 2013 – 2016 : SMP Negeri 2 Deli Tua
3. Tahun 2016 – 2019 : SMA Istiqlal Deli Tua
4. Tahun 2019 – Sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 12 September 2023



Audi Nur Khalis
NPM.1905170059